

# SOSIALISME CHINA: MODEL MASA DEPAN?

# MASTIS

ous fakta



PETAN, 70X90 cm  
oil on canvas, 2023  
karya RUDY MARDIJANTO

**HERU PRAKOSA**  
**Etika Politik:**  
Tegangan Penuh Riak

**R. SETIAWAN AJI**  
**Menalar Kelindan AI,**  
*Big Data*, dan  
Persoalannya

**ABDUL AZIZ RASJID**  
**Arsip Sastra:**  
Telaah dan Algoritma

Rp30.000,00

DUA BULANAN, NOMOR 09 - 10, TAHUN KE-72, 2023

SIUPP No. 213/SK/MENPEN/SIUPP/D.1/1986.  
Jo Ditjen PPG  
Nomor 32/Ditjen/PPG/K/1996, 27 Maret 1996  
Penerbit

**Yayasan BP Basis**  
Anggota SPS ISSN: 0005-6138  
Penasihat  
**Franz Magnis-Suseno**

Pemimpin Umum  
**Sindhunata**

Pemimpin Redaksi  
**A. Setyo Wibowo**

Wakil Pemimpin Redaksi  
**A. Sudiarja**

Dewan Redaksi  
**B. Hari Juliawan**  
**Heru Prakosa**  
**A. Bagus Laksana**

Redaktur Pelaksana  
**C. Bayu Risanto**

Redaktur  
**Dian Vita Ellyati**  
**Francisca Purnawijayanti**

Redaktur Artistik  
**Hari Budiono**

Sekretaris Redaksi  
**Anang Pramuriyanto**

Promosi/ iklan  
**Slamet Riyadi, A. Yulianto**  
**Willy Putranta**

Administrasi/ Distribusi  
**Maria Dwijayanti**

Dokumentasi  
**Francisca Triharyani**

Keuangan  
**Ani Ratna Sari**  
**Widarti**

#### Alamat

Jl Pringgokusuman No. 35, Yogyakarta  
Telepon: 081225225423, Faks: (0274) 546811

#### Surel administrasi/distribusi:

basis.adisi@gmail.com

Surel redaksi: majalahbasis@gmail.com

#### Rekening:

BCA No. 1263333300 a.n. Yay Basis,  
BRI No. 0029-01-000113-56-8 a.n. Sindhunata  
BNI No. 1952000512 a.n. Bpk Sindhunata

**KACABENGGALA / Heru Prakosa**  
Etika Politik: Tegangan Penuh Riak ... 2

**SOSIAL / Franz Magnis-Suseno**  
Sosialisme China: Model Masa Depan? ... 16

**SOSIAL / R. Setiawan Aji Nugroho**  
Menalar Kelindan AI, Big Data, dan Persoalannya ... 23

**BUKU / Y. Sumardiyanto**  
Dalam Segala Mencintai dan Melayani ... 27

**BUKU / St. Sularto**  
Snouck Hurgronje Plus-Minus ... 31

**SASTRA / Abdul Aziz Rasjid**  
Arsip Sastra: Telaah dan Algoritma ... 34

**SOSIAL / Aris Setiawan**  
Gending, Dibunyikan untuk  
Tidak Sepenuhnya Didengarkan... 39

**LAPORAN / Khalifah Anggara Puri Mahacinta**  
Bukan Sembarang Sekolah ... 42

**PUISI / Beda Holy Septiano**  
Elegi Privasi ... 46

Putri A ... 47  
Jalan Bahagia ... 48  
Perjamuan Tanpa Kata ... 49

**CERPEN / Boni Candra**  
Orang-orang Jakarta ... 50

**SOSIAL / Sindhunata**  
Jago Ratu Adil ... 56

KACABENGGALA



# Etika dan Politik: Tegangan Penuh Riak

HERU PRAKOSA



Lukisan karya AHMAD ALWI,  
"Mengayomi", AoC, 40x60 cm, 2023 | Bentara Budaya Yogyakarta

Dalam antologi *Mishkat al-Masabih*, Muhammad ibn ‘Abd Allah Khatib al-Tibrizi (m. 1340/1341) mengutip sebuah hadis atau tradisi kenabian yang diyakini bersifat autentik dan dapat dipercaya (*sahih*):  
 “Pemimpinmu akan menjadi cerminan dirimu.”

Dari hadis ini, kita dapat memetik dua poin yang berbeda, sekaligus terkait erat, antara etika dan politik. Di satu sisi, disposisi etis seseorang. Sisi yang lain adalah kepemimpinan. Disposisi etis individual dan sosial yang terbangun di tengah masyarakat tak dapat dipisahkan dari cara pandang dan cara bertindak pemimpinnya. Dengan demikian, perlu diidentifikasi pemimpin yang dapat membangun etika secara positif.

Etika dan politik saling berhubungan. Keduanya sering kali menimbulkan berbagai tantangan yang kompleks dan rumit. Ini dapat dipahami, mengingat keputusan dan tindakan yang datang dari figur pemimpin politik memiliki konsekuensi yang luas bagi individu, masyarakat, bahkan komunitas global. Untuk menanggapi tantangan yang terkait dengan pengambilan keputusan politik, dibutuhkan pertimbangan atas dasar prinsip-prinsip etika.

Seorang filsuf Yunani dari zaman Sebelum Masehi, Herakleitos, berkata, “Akal budi bersifat umum bagi semua orang, tetapi kebanyakan orang seolah-olah hidup sedemikian rupa sehingga masing-masing memiliki pengetahuan pribadi mereka sendiri” (Black, 2016, 3). Agar orang-orang dari latar belakang intelektual, moral, kultural, dan religius yang berbeda dapat saling memahami dan hidup bersama secara damai, perlu keterbukaan dan penghargaan satu sama lain. Pandangan dan kearifan yang dikembangkan oleh para pemikir dan kaum bijak tentang politik dari masa ke masa, dan dari peradaban satu ke peradaban lain, dapat memberi pencerahan dan memperluas wawasan.

#### Becermin dalam Sejumlah Peradaban

Dalam peradaban Mesir kuno, orang dibuat terpesona oleh unsur-unsur alam. Salah satunya adalah matahari. Pandangan dan perilaku orang-orang banyak tergantung pada kekuatan alam, termasuk matahari,

yang tampaknya bersikap “sewenang-wenang” atas diri mereka. Ini tak dapat dielakkan karena, bagaimanapun, alam terkait erat dengan hidup dan mata pencaharian mereka. Dalam hal ini, kepemimpinan Firaun diterima sebagai pihak yang memiliki relasi istimewa dengan para dewa dan bertanggung jawab penuh untuk mengelola alam bagi kesejahteraan rakyat. Amenemhat I (m. 1952 SM) menyatakan:

Aku adalah orang yang menghasilkan jelai dan mencintai dewa jagung. Sungai Nil menghormati aku di setiap kenajisan. Tidak ada yang lapar atau haus di tahun-tahunku. (Frankfort, 1978: 17)

Ada keyakinan bahwa kepemimpinan dan perilaku Firaun yang benar akan membuat kosmos berjalan dengan semestinya, sehingga matahari akan tetap terbit dan Sungai Nil mengalirkan air demi terjaganya kemakmuran warga masyarakat. Kata kuncinya adalah penegakan kesejahteraan atas dasar keadilan (*maat*). Dewa matahari, Ra, telah menempatkan raja di bumi untuk mengatur warga. Etika kepemimpinan, dengan demikian, terkait erat dengan alam. Konsekuensinya, keberadaan semesta yang terbuka bagi semua pihak menuntut orang untuk melestarikan alam, bukan demi keuntungan pribadi, tetapi demi kepentingan bersama.

Risalah tertua tentang etika kepemimpinan dalam hidup bersama di peradaban Mesir adalah *The Instruction of Ptahhotep*. Risalah tersebut memuat nasihat tentang etika dan tata kelola birokrasi, termasuk pemeliharaan bangunan atau sarana-sarana publik, dan perayaan keagamaan, serta pertahanan. Dihadapkan pada tanggung jawab tersebut, pemimpin dituntut untuk bersikap murah hati, mau berbagi, dan tidak egois. Nilai-nilai sentral yang ditetapkan bagi pemimpin dan orang-orang kebanyakan, baik untuk perilaku individu dan sosial, adalah keadilan dan kebajikan. Itu merupakan dua sisi dari mata uang yang sama.

Aku perlu menyelamatkan pihak yang lemah dari pihak yang lebih kuat sebaik mungkin, dan aku wajib memberikan roti kepada yang lapar, pakaian kepada yang telanjang. (Black, 2016: 25)

Dalam peradaban Mesopotamia, tatanan alam dan keteraturan sosial juga mendapat perhatian utama. Dalam konteks Sumeria, misalnya, seorang pemimpin dianggap perlu memiliki kualitas ideal, yang mencakup: kesempurnaan fisik, keberanian dalam bertindak, wawasan luas, dan sikap arif bijaksana terhadap orang-orang yang dipimpinya. Seperti di Mesir, ada pandangan bahwa raja berperan besar dalam melindungi orang miskin, lemah, dan tertindas dari pelanggaran hukum atau dominasi orang kaya serta berkuasa. Jadi, tekanannya ada pada kebenaran, kearifan, dan kebijaksanaan. Prinsip tata kehidupan bersama yang diberlakukan lebih didasarkan pada kebenaran (*kittum*). Hammurabi (m. 1750 SM), dengan sebutan “Dewa Matahari dari Babilonia yang menyebabkan sinar memancar di tanah Sumeria dan Akadia”, mengatakan bahwa dia telah diangkat menjadi raja “untuk menyebabkan kebenaran berlaku di negeri itu, untuk menghancurkan pihak-pihak yang jahat, agar yang kuat tidak boleh menindas yang lemah” (Black, 2016, 36 & 38). Karena itu, dia menuliskan hukum-hukum demi tegaknya keadilan bagi anak yatim dan janda. Tugas pemimpin adalah untuk menerapkan kebenaran, terutama dengan keputusan-keputusan hukum yang adil, tanpa mengistimewakan pihak yang kuat di atas kaum yang lemah.

Tampak adanya persamaan dan perbedaan antara pandangan serta praksis yang berlaku dalam konteks Mesir dan Mesopotamia. Pemimpin dipandang sebagai pihak yang memiliki kekuasaan tidak terbatas, dengan tanggung jawab untuk memberi perhatian bagi pihak-pihak yang tidak memiliki kekuatan di bidang sosial dan ekonomi. Meskipun demikian, dalam konteks Mesopotamia, sistem pemerintahan dan tatanan hidup bersama dijalankan tanpa terlalu mengacu pada peran dewa-dewi. Hubungan pemimpin dengan dewa-dewi tidak sekuat seperti yang diyakini dalam konteks Mesir; dan karena itu, tidak ada satu pun Raja Mesopotamia yang didewakan.

Dalam peradaban Persia atau Iran, etika politik tampak lewat kebijakan pemimpin yang memasukkan keragaman suku dan bangsa serta keyakinan, sebagai bagian integral dari penghargaan akan perbedaan. Re-

zim yang berkuasa diidentifikasi dengan semangat multikulturalisme. Para pemimpin menjalankan kebijakan pemerintahan secara terbuka tanpa terlalu melakukan intervensi atau campur tangan terhadap pihak-pihak yang ditaklukkan. Raja-raja Persia secara tidak langsung memberikan perhatian lebih eksplisit pada keragaman, dan mengizinkan pihak-pihak yang dikalahkan untuk memerintah diri mereka sendiri dengan ruang otonomi yang cukup sebagai ahli waris sah dari monarki lokal. Darius (m. 486 SM) dengan gelar “raja segala raja” (Black, 2016, 45), misalnya, membangun tata kelola dan pengaturan yang mengantar pada pemerintahan di wilayah yang lebih kecil dalam bentuk provinsi-provinsi dengan pemimpin-pemimpin lokal. Sebuah ikonografi dari kerajaan Akhemeniyah menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara raja dan rakyat terbangun sebagai suatu “konsensus”, bukan “paksaan”. Suatu perayaan penghormatan digambarkan sebagai peristiwa yang diikuti secara sukarela oleh pemimpin-pemimpin lokal sebagai perwakilan dari wilayah bawahan.

“

Dewa matahari, Ra,  
telah menempatkan raja  
di bumi untuk mengatur  
warga. Etika kepemimpinan,  
dengan demikian,  
terkait erat dengan alam.  
Konsekuensinya, ke-  
beradaan semesta yang  
terbuka bagi semua pihak  
menuntut orang untuk  
melestarikan alam, bukan  
demi keuntungan pribadi,  
tetapi demi kepentingan  
bersama.

Jadi, sikap yang terbuka dan penghargaan terhadap budaya dan kepercayaan lain mendapat tekanan lebih kuat. Raja Koresh (m. 530 SM), misalnya, memberi ruang terbuka pada pelaksanaan kultus lain, di samping kultus yang bercorak Persia. Setelah menaklukkan Babel pada tahun 539 SM, Koresh membuat keputusan tegas:

Aku kembali ke kota-kota suci di seberang Sungai Tigris yang tempat-tempat sucinya telah hancur, yang di sana dulunya juga terpampang gambar-gambar dan berdiri tempat-tempat pemujaan. Aku mengumpulkan semua pihak yang dulu menghuni kota-kota itu; dan aku mengembalikan mereka ke hunian asal mereka (Yana, 2008, 24).

Itu pula alasannya, mengapa orang-orang Yahudi dapat kembali ke tanah air mereka dan membangun kembali Kuil Yahweh. Artaxerxes I (m. 424 SM), misalnya, atas dasar catatan dari Kitab Ezra (Ez. 7: 11-26), memberi otonomi hukum dan wewenang kepada orang Yahudi untuk memberlakukan hukum Musa. Dengan demikian, Raja-raja Persia mengenakan pendekatan baru dalam sistem kepemimpinan; dan cara itu rupa-rupanya telah menjadikan Persia sebagai jembatan penghubung dengan peradaban dari latar

belakang India, Mesopotamia, Yunani, termasuk dengan masyarakat suku yang tak terhitung jumlahnya.

Pada abad keenam dan kelima Sebelum Masehi, selama dan setelah masa pembuangan, orang-orang Yahudi telah mengembangkan pandangan yang berbeda tentang apa artinya menjadi suatu bangsa. Dalam konteks ini, berkembanglah sikap relasional antara Allah, raja, dan rakyat. Corak dan status keberadaan orang-orang Yahudi dibangun atas dasar hubungan mereka yang unik dengan Allah. Apa yang tampak baru di sini, dalam kaitannya dengan tatanan sosial, adalah relasi dengan Allah tidak pertama-tama terbangun dengan raja, tetapi dengan seluruh bangsa. Ini dinyatakan sebagai sebuah perjanjian antara Allah dan umat-Nya. Poin pentingnya adalah bahwa tempat dan kedudukan warga masyarakat dalam sebuah bangsa, secara keseluruhan telah diangkat. Keistimewaan status tidak menjadi monopoli sang pemimpin: seluruh bangsa mendapat tempat yang terhormat di hadapan Allah selaku pemberi dan penentu hukum yang mengatur perilaku hidup sehari-hari. Persamaan hak dan tanggung jawab pun menjadi milik semua anggota masyarakat.

Dalam peradaban Timur Tengah, sehubungan dengan tata kepemimpinan dan perilaku etis, yang tampak sangat mencolok adalah umat selaku warga masyarakat mendapat peran yang jauh lebih besar. Nuansa harapan lebih digemakan. Dikatakan, sekalipun ada pada masa kehancuran, mereka akan tetap mendapat perhatian. Karena itu, mereka mampu memaknai secara positif pengalaman pada masa-masa sulit di tempat pembuangan dan pengasingan di Babel (587-538 SM) dalam kerangka penempatan diri untuk memperkuat solidaritas sebagai satu bangsa. Ini berpengaruh pula dalam cara pandang tentang *mesias* atau pemimpin yang akan membawa pada kebenaran dan kesejahteraan sejati. Pemimpin yang sejati adalah pribadi yang mampu mengantar warga masyarakat pada pembebasan. Nilai-nilai etis-spiritual dan moralitas adalah pembebasan, yang awalnya dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Yahudi, sejatinya ditujukan pula bagi seluruh manusia.

Dalam peradaban India, salah satu kata kunci yang menjadi pegangan adalah *dharma*. Arti di balik ungkapan ini beragam, seperti prinsip etis, hukum kebenaran, moralitas, kebijaksanaan, kebajikan, dan tatanan sosial. Meskipun demikian, layak dicatat bahwa etika politik dalam peradaban India kuno sebenarnya berkembang dalam dua arah, tidak hanya dalam pengertian *dharma* atau pemikiran yang terkait dengan *dharma*, namun

“

Pemimpin yang sejati adalah pribadi yang mampu mengantar warga masyarakat pada pembebasan. Nilai-nilai etis-spiritual dan moralitas adalah pembebasan, yang awalnya dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Yahudi, sejatinya ditujukan pula bagi seluruh manusia.

juga *artha*. Dalam hal ini orang diingatkan pada *Artha-shastra* yang ditulis oleh seorang filsuf dan ahli politik India kuno, Kautilya, atau dikenal juga sebagai Chanakya (m. 283 SM). Nama *artha-shastra* berasal dari kata Sanskerta, *artha*, yang berarti maksud atau tujuan, sementara *shastra* berarti risalah. Intensi penulisan karya ini untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang hukum tata negara yang memungkinkan seorang raja memerintah secara efektif lewat keputusan-keputusan konkret guna menanggapi persoalan-persoalan riil di depan mata. Sebagai buku pegangan yang disusun untuk pendiri Kerajaan Maurya, Chandragupta (m. 295 SM), *Artha-shastra* memuat ajaran yang mengulas upaya-upaya untuk mencapai kemakmuran atau kesejahteraan, melakukan perluasan wilayah negara, dan memperhatikan keamanan atau ketertiban sosial dengan pendekatan yang bersifat pragmatis. Dasarnya lebih bertolak dari pengalaman serta pengamatan empiris, daripada pemikiran dengan landasan otoritas tekstual.

Tegangan antara tuntutan *dharma* dan kebutuhan nyata yang dihadapi dalam realitas konkret terlukis secara indah dalam epik Mahabharata, misalnya, lewat kisah tentang Bisma dan Arjuna. Bisma yang dikisahkan tumbuh sebagai seorang pemuda kuat dan bijak di Kerajaan Hastinapura, dianggap akan tanpa kesulitan mencapai tampuk kekuasaan tertinggi. Namun, nyatanya Bisma memutuskan untuk melepaskan haknya atas takhta Hastinapura demi tercapainya keinginan Ayahandanya, Prabu Santanu, yang hendak menikahi Dewi Satyawati. Ini terkait dengan tuntutan Satyawati, bahwa hanya keturunan dari dialah yang nantinya memiliki hak untuk berkuasa. Bisma, lebih berpegang pada *artha* daripada *dharma*, bersumpah untuk tidak menikah. Dengan demikian ia tidak akan memiliki keturunan yang akan menjadi penguasa Hastinapura.

Kisah tentang Bisma menunjukkan bahwa kepemimpinan tak jarang dipicu oleh pertimbangan-pertimbangan pragmatis-fungsional. Sementara itu, Arjuna dikisahkan mengalami konflik batin dan emosi ketika dihadapkan pada tuntutan praktis di tengah peperangan melawan guru dan saudara-saudaranya sendiri. Seperti Bisma, Arjuna dihadapkan pada pilihan antara *dharma* dan *artha*. Pada malam terakhir pertempuran, Kreshna memberikan wejangan yang mengantar pada pandangan bahwa mengelak dari sebuah perjuangan demi suatu kebenaran sama artinya dengan meninggalkan tugas kewajiban dan mencederai

“

Para tokoh Konfusianis menekankan bahwa sikap dan tindakan seorang penguasa dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya harus memperhatikan faktor keteladanan dalam hal moralitas dan keluhuran budi serta keadilan.

kehormatan; dan itu berarti sebuah pelanggaran. Arjuna pun dengan langkah mantap maju ke laga peperangan.

Kautilya bersikeras bahwa kesejahteraan material lebih penting daripada kenyamanan batin atau kesenangan lahiriah, karena keduanya bergantung pada kesejahteraan material. Prinsip *Artha-shastra* tampak dalam diri Bisma yang mengorbankan kesenangan lahiriah, dan dalam diri Arjuna yang mengorbankan kenyamanan batin. *Artha-shastra*, dengan begitu, menjadi kebalikan dari *Bhagavad Gita* yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam tindakan. Pendekatan *Artha-shastra* memperlihatkan nilainya tersendiri, yaitu upaya untuk menyelaraskan antara cita-cita ideal moral dengan keputusan praktis yang membumi, sesuai dengan tantangan kontekstual yang dihadapi secara riil.

Selanjutnya, dalam peradaban Tiongkok kuno, pada masa tertentu, pemimpin dipandang sebagai “putra langit” yang memiliki aspirasi etis dan mistik. Fungsi negara mendapat penegasan yang cukup kuat. Sistem pemerintahan yang menghubungkan dimensi etis dan politis dijalankan dengan pendekatan yang melibatkan sejumlah pihak dengan corak beragam, seperti Konfusian, Taois, dan Legalis. Konfusianisme memberi penekanan kuat pada prinsip-prinsip etika, seperti kebajikan, kebenaran, kesetiaan, dan bakti. Prinsip-prinsip ini tidak hanya dianggap penting bagi perilaku individu, tetapi juga bagi suatu kekuatan sosial semacam



pemerintahan politik. Para tokoh Konfusianis menekankan bahwa sikap dan tindakan seorang penguasa dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya harus memperhatikan faktor keteladanan dalam hal moralitas dan keluhuran budi serta keadilan. Peran dan tanggung jawab pemimpin lebih didasarkan pada kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial – sesuatu yang sering dikaitkan dengan pengertian *meritokrasi* – demi terciptanya tatanan sosial yang stabil dan bersih secara etis.

Sementara itu, kaum Legalis memberi tekanan pada penggunaan hukum dan peraturan ketat demi terjaganya tertib atau kontrol sosial. Mereka percaya, manusia akan lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri, karenanya perlu kendali eksternal kuat untuk mengaturnya. Masyarakat yang merupakan sistem hidup bersama perlu diasiasi agar terhindar dari kekacauan akibat eskalasi kepentingan individu. Jelas, tata aturan memegang peranan penting. Meski tidak memberi tekanan pada orientasi etis seperti Konfusianisme, nyatanya aliran Legalisme telah membawa pengaruh kuat dalam sistem ketatanegaraan di Tiongkok. Di samping itu, hadir pula cara pandang Taois yang mengedepankan pentingnya keselarasan dengan tatanan alam. Meskipun tidak memfokuskan diri secara langsung pada persoalan sosial di ranah politik, pendukung aliran ini memberikan sumbangan yang berpengaruh. Ini menjadi nyata dalam pembatasan terhadap kekuasaan negara sedemikian rupa, sehingga campur tangan dan intervensi pemerintah lalu bersifat proporsional dan tidak terlalu dominan.

#### Belajar dari Beberapa Filsuf Muslim

Di antara para filsuf muslim, Al-Farabi (m. 951) mendapat perhatian khusus. Hidup di Harran, kota pusat kebudayaan Yunani di Asia, dalam tempaan filsuf kristiani, Yuhana ibn Haylan (m. 941) dan Matta ibn Yunus (m. 939), al-Farabi dikenal karena mengembangkan filsafat seputar tema politik. Lewat karyanya, al-Farabi menegaskan bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama, karena filsafat merupakan sebetuk pemaknaan atas apa yang diungkap dan digambarkan secara simbolis dalam agama. Dengan demikian, filsafat juga dapat dimaknai sebagai jalan yang akan mengantarkan manusia mencapai tujuan hidupnya, yakni kebahagiaan.

Al-Farabi menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan pada dasarnya tidak akan dapat



meraih kebahagiaannya secara mandiri; dan karena itu, perlu suatu sistem sosial tertentu. Pencapaian kebahagiaan dapat ditempuh melalui kehidupan bersama dalam suatu tatanan sosial politik. Keberadaan manusia menjadi salah satu syarat terbentuknya negara. Dalam hal ini, ia membedakan sejumlah kategori, yaitu, negara utama (*al-madinah al-fadila*), negara orang-orang tanpa pengetahuan (*al-madinah al-jahilah*), negara orang fasik (*al-madinah al-fasiqa*), negara orang-orang yang tak



Foto: FPW | 26 Juli 2023,  
Pendopotulungo, Yogyakarta.

konsisten (*al-madinah al-mutabaddilah*), dan negara sesat (*al-madinah al-dalla*).

Orang yang membuat pertimbangan dan menyimpulkan tentang takaran yang memadai dan seimbang dalam hal nutrisi dan obat-obatan, bagaimana itu dapat terjadi, adalah dokter. Seni yang dengannya orang membuat pertimbangan tersebut adalah ilmu kedokteran. Orang yang menyimpulkan keadaan yang memadai dan seimbang dalam hal perilaku

dan tindakan moral adalah gubernur kota dan raja. Seni yang dengannya orang membuat pertimbangan tersebut adalah seni berpolitik dan kepiawaian dalam tata pemerintahan. (Al-Farabi [terj. Butterworth, Charles E.], 2001: 22)

Bagi al-Farabi, hidup bersama dalam masyarakat adalah sebuah seni. Ia membandingkan antara seni berpolitik dengan seni menangani masalah kesehatan

lewat ilmu kedokteran. Menurutnya, ini merupakan seni untuk menyasati kondisi-kondisi yang, langsung atau tak langsung, menentukan tindakan dan perilaku individu dalam memaknai hidupnya di tengah tatanan sosial. Seni juga menunjuk pada kemampuan untuk mengolah kekuasaan, sebagaimana seorang “ahli” yang, dengan kepaiwaan dan “jiwa” artistiknya, mau membentuk suatu hasil karya secara indah.

Al-Farabi membangun pandangan yang positif tentang ilmu politik sebagai ilmu penting yang memberi perhatian pada perilaku manusia, termasuk moralitas, tindakan, dan cara bertindak yang diupayakan untuk meraih tujuan hidup, yaitu kebahagiaan sejati. Kajiannya memiliki aspek moral karena menyentuh hal-hal yang mendukung ke arah kebahagiaan – yaitu kebajikan – dan hal-hal yang melawan ke arah itu seperti tampak dalam bentuk-bentuk kejahatan. Ilmu politik juga merupakan suatu bentuk filsafat karena kajiannya terarah pada pencarian pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat universal sekaligus mendalam. Ini dibangun lewat jalan pengamatan dan pengalaman atas proses panjang yang ditempuh oleh manusia dalam menyikapi persoalan-persoalan seputar kebajikan dan kejahatan.

“

Al-Farabi membangun pandangan yang positif tentang ilmu politik sebagai ilmu penting yang memberi perhatian pada perilaku manusia, termasuk moralitas, tindakan, dan cara bertindak yang diupayakan untuk meraih tujuan hidup, yaitu kebahagiaan sejati.

Ilmu politik mau tidak mau bersinggungan dengan suatu bentuk tata peraturan lewat kepemimpinan. Dari perspektif tertentu, tanggung jawab individu mendapat perhatian. Dari perspektif lain, al-Farabi juga berbicara tentang pemimpin yang bertugas untuk mengawal individu-individu sedemikian rupa sehingga tujuan kebahagiaan yang dicanangkan oleh masing-masing individu dapat tercapai, dan pada saat yang sama kepentingan bersama tetap terpenuhi. Untuk itu, menurutnya, pemimpin harus mempunyai kemampuan fisik dan jiwa, dengan aspek rasionalitas dan sekaligus spiritualitasnya. Pemimpin ideal – yang oleh Plato disematkan dalam diri filsuf – dimaknai oleh al-Farabi dalam konteks Islam Syiah ada pada diri Imam.

Pemaknaan akan tata pemerintahan dan politik sebagai sebuah hasil karya seni (*sina'a*) juga digaungkan oleh filsuf sezaman dengan al-Farabi, yaitu Abu Zayd al-Balkhi (m. 934). Sebagaimana obat dikembangkan untuk mengupayakan kesehatan, menurut al-Balkhi, kemampuan untuk menata hidup bersama dalam kancah politik dikembangkan untuk tercapainya kesejahteraan umum (*maslaha*) dalam hidup aktual di dunia. Para pemimpin yang berurusan dengan persoalan-persoalan hidup bersama memberi perhatian untuk menjaga fitrah manusia yang berasal dalam kondisi baik dan menyikapi kecenderungan-kecenderungan negatif akibat penyimpangan dan kesesatan cara pandang serta cara bertindak.

Pandangan al-Farabi yang bergaung pada pemikiran Abu Zayd al-Balkhi, selanjutnya diikuti oleh kelompok yang berkembang pada sekitar abad ke-10 Masehi, yaitu *Ikhwan al-Shafa*. Berkenaan dengan argumentasi mereka tentang kualifikasi sejumlah figur yang berpengaruh dalam tatanan sosial, mereka berbicara mengenai parameter tertentu.

*Pertama*, kualitas figur pemimpin yang disejajarkan dengan para nabi dan kaum filsuf. Mereka harus memiliki kematangan dalam banyak perkara; dan usia mereka sekurang-kurangnya 50 tahun. Mereka itulah yang dapat diharapkan akan mampu mencerahkan banyak pihak lewat cara pandang dan cara hidup yang penuh martabat rajawi (*al-martabat al-malakiyya*).

*Kedua*, kualifikasi yang setara dengan seorang figur seperti sultan, dengan usia sekurang-kurangnya 40 tahun, dan memiliki pemikiran serta perilaku yang bijaksana, unggul, serta terpuji (*al-fudala' al-kiram*). Selanjutnya, kualifikasi seorang pemuka masyarakat yang dilukiskan minimal berusia 30 tahun dan memiliki sikap

arif serta dapat diandalkan (*al-akhyar wa al-fudala*), dan kualifikasi seorang yang cakap atau terampil, dengan usia lebih dari 15 tahun dan layak diteladani dalam kepakaran, kesalehan, serta perhatian sosial (*al-abrar wa al-ruhama*).

Filsuf lain yang perlu pula diangkat adalah Ibn Sinna (m. 1037). Salah satu pendapatnya yang mungkin dapat mengundang silang pendapat adalah bahwa dalam situasi tertentu, perlawanan terhadap pemimpin dan rezim yang berkuasa lewat pemberontakan bukanlah hal yang tabu (bdk. Black, 2011: 75). Jika ada seorang pemimpin yang membuat klaim sepihak atas dasar kekuasaan atau kekayaan yang dimiliki bahwa dia merupakan pihak yang berhak memegang tampuk kepemimpinan, maka menjadi tugas setiap warga masyarakat untuk melawan dan menyingkirkannya. Seandainya ada pihak yang mampu menunjukkan bahwa pemimpin yang berkuasa memang tidak layak, atau malah sama sekali tak memadai, maka parameter yang dapat dikenakan dalam pengambilan keputusan untuk kasus ini adalah aspek kemendesakan, bahwa perebutan kekuasaan perlu dilakukan atas dasar alasan-alasan darurat. Dalam hal ini, setiap warga harus bersedia menerima klaim dari pihak yang menggulingkan kekuasaan.

Dengan mengikuti pandangan al-Farabi, Ibn Sinna juga mendukung pembagian peran di dalam masyarakat. Sebagian anggota masyarakat dikatakan berperan sebagai penanggung jawab di bidang administrasi, sebagian lain sebagai pelaku usaha, dan sebagian lainnya lagi di wilayah keamanan atau ketertiban sosial. Fungsi pemerintah adalah mendistribusikan kembali hasil yang diperoleh dari pihak pelaku usaha, seperti petani atau pengrajin atau pedagang, ke kelompok-kelompok yang tidak mempunyai urusan langsung dengan produksi, seperti tentara, pegawai negeri, dan terutama kaum miskin serta difabel. Di samping itu, para pemimpin bertanggung jawab pula untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh individu-individu yang malas bekerja atau menganggur. Pekerjaan-pekerjaan yang menyalahgunakan kekayaan dan meracuni semangat produktif, seperti perjudian, wajib ditindak tegas. Ringkasnya, pemimpin perlu menguasai secara andal cara-cara untuk mengatur pasar hingga upaya-upaya untuk mengawasi atau menegakkan moral publik.

Berbicara seputar tata pemerintahan dan politik dari kalangan filsuf muslim, nama Ibn Rushd (m. 1198) perlu mendapat perhatian istimewa. Ia mengembangkan

“

Jika ada seorang pemimpin yang membuat klaim sepihak atas dasar kekuasaan atau kekayaan yang dimiliki bahwa dia merupakan pihak yang berhak memegang tampuk kepemimpinan, maka menjadi tugas setiap warga masyarakat untuk melawan dan menyingkirkannya.

pemikirannya dalam komentarnya atas karya Aristotle, *Nicomachean Ethics*, dan atas karya Plato, *Republic*. Ibn Rushd berpendapat bahwa *Nicomachean Ethics*, dengan analisis konseptualnya tentang kebajikan dan nilai-nilai moral, memuat kajian teoritis Aristoteles seputar politik dan hukum. Pada bagian akhir dari *Nicomachean Ethics*, Aristoteles membahas hukum yang berperan sebagai salah satu cara bagi kebanyakan orang untuk mencapai kebajikan dan menanamkan tertib sosial. Bagi Aristoteles, semua itu merupakan langkah awal untuk memasuki ranah politik dan pemerintahan. Ibn Rushd berpikir bahwa kajian atas karya Aristoteles akan menjadi lengkap bila disertai dengan kajian praktis tentang politik dan penyusunan hukum dalam tata pemerintahan sipil. Sayangnya, tulisan Aristoteles yang memuat gagasan tersebut tak dapat diperoleh Ibn Rushd. Akhirnya Ibn Rushd membuat kajian lewat komentarnya terhadap pandangan Plato tentang negara.

Komentar Ibn Rushd atas *Republic* terbagi ke dalam tiga bagian. Bagian I dan II mengulas keadaan yang bersifat ideal, seperti tampak dalam tema pendidikan kaum muda dan filsuf selaku pemimpin paling unggul.

Di sini, karakter berbudi luhur menjadi kata kunci. Di bagian III, Ibn Rushd menampilkan komentarnya tentang keadaan-keadaan yang bertentangan dengan karakter berbudi luhur. Di sini orang akan mendapati pandangan Ibn Rushd tentang aspek-aspek praktis dari bidang politik. Salah satu cara yang dikembangkan oleh Ibn Rushd adalah mengangkat realitas atau peristiwa politik aktual pada zaman itu. Sehaluan dengan Aristoteles, Ibn Rushd bersikeras bahwa tindakan politik yang akan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan melalui hukum perlu memperhatikan tidak hanya pengetahuan teoretis, tetapi juga pengetahuan praktis. Ibn Rushd menjelaskannya sebagai berikut:

Dalam musik, kedokteran, dan bidang lainnya, tindakan yang berdaya guna hanya akan mewujudkan melalui dua cara, dalam jalur ilmu kognitif dan ilmu praktis yang terbangun lewat pengalaman empiris. (Black, 2011: 123)

Ibnu Rushd menekankan perlunya pengalaman empiris. Bahkan, penekanan ini jauh lebih kuat daripada yang ditandakan Aristoteles. Siapa pun yang ditugasi untuk menyusun hukum, menurutnya, harus ditunjuk atas dasar pengalamannya; dan siapa pun yang ingin berkecimpung dalam dunia pemerintahan negara, wajib memiliki pengalaman yang memadai (Black, 2011, 123-124). Pengetahuan teoretis tentang prinsip-prinsip umum atau universal, sebagaimana terelaborasi dalam karya Aristoteles, memang dibutuhkan, namun, bagi Ibn Rushd, dalam bidang-bidang praktis, termasuk kedokteran atau politik, pengetahuan teoretis semata pasti tidaklah memadai. Alasannya pun tak terbantahkan, karena semua itu harus bermuara pada tindakan konkret.

Ibn Rushd seringkali disandingkan dengan al-Ghazali, sebagaimana orang mengingat perdebatan mereka melalui buku *Tahafut al-Falasifa* dan *Tahafut al-Tahafut*. Lalu, bagaimana sikap politik yang dijunjung oleh al-Ghazali (m. 1111)? Untuk menjawab pertanyaan ini, orang perlu memberi perhatian pada gagasannya tentang teori pengetahuan. Tak dapat disangkal, al-Ghazali menggarisbawahi pentingnya peran pengetahuan (*ilm*) dan akal budi (*taql*), karena hanya lewat akal budilah manusia mendapat tanggung jawab sebagai khalifah Allah (Q. II: 30). Baginya, tindakan "mengetahui" lewat akal budi merupakan langkah yang amat berharga, sekaligus dasar untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini serta

di dunia akhir.

Pengetahuan yang dimaksud oleh al-Ghazali dalam hal ini adalah *ma'rifa*, atau pengetahuan batin, yaitu pengetahuan yang terhubung dengan pengalaman spiritual, yang melampaui kecerdasan intelektual dan keluasan wawasan serta kecenderungan untuk sekadar mau mengikuti pendapat pihak lain (*taqlid*). Menurutnya, pengetahuan jenis inilah yang akan mengantar pada tindakan yang arif, bijaksana, dan bernilai etis. Pengetahuan spiritual dan nonspiritual, sebagaimana aktivitas mental dan tubuh, memiliki keterkaitan erat; dan karena itu integrasi antara ide dan tindakan, juga antara kata dan perbuatan, tak dapat ditawar-tawar lagi. Al-Ghazali tak segan memberi teguran keras kepada para ulama, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan agama mumpuni, bila mereka hanya berhenti pada penalaran diskursif dan tidak mampu mempraktikkan apa yang dikatakan. Dalam karyanya yang memuat nasihat-nasihatnya bagi para raja, *Nasihat al-Mulk*, pada prinsip ketiga, al-Ghazali berseru:

Yakinlah akan hal ini, hai Sultan, bahwa keadilan muncul dari kesempurnaan intelek, dan bahwa kesempurnaan intelek berarti Anda telah melihat hal-hal sebagaimana adanya, dan memahami fakta-fakta realitas batin mereka tanpa tertipu oleh penampilan luar mereka (al-Ghazali [terj. Bagley], 1964, hal. 24).

Dalam perspektif lain, filsuf sekaligus mistikus muslim modern, Shaikh Sirhindi (m. 1624) dan Shah Waliullah (m. 1762), memaknai praktik politik sebagai cara-cara untuk mengatur diri atau upaya untuk menyiasati dunia batin (*siyasat al-batiniah*). Karena itu, mereka juga mendorong para ulama dan tokoh agama untuk tidak takut melibatkan diri dalam bidang politik dan tata pemerintahan, guna dapat meng-



hindarkan warga masyarakat dari penalaran sesat yang dibangun oleh oknum-oknum tertentu, dan dengan demikian memperbaiki situasi eksternal (*siyasat al-kharijiya*). Sehaluan dengan itu, para pelaku sufi kontemporer, seperti Abdullah ibn Bayyah (lh. 1935) dan muridnya Syekh Hamza Yusuf (lh. 1958) – yang mengikuti ajaran tasawuf al-Ghazali – juga mengundang orang untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Ketika sebuah sistem yang menghadirkan ketertiban dan stabilitas menuntut adanya keterlibatan politik, maka pentinglah untuk berpartisipasi lewat cara-cara yang benar. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan di Singapura, Hamza Yusuf menjawab pertanyaan tentang pelaku politik dalam demokrasi modern:

Pertanyaan itu murni didasarkan pada

konteks di mana mereka berada. Di negara seperti Singapura, di mana umat Islam memiliki akses ke proses politik, sangat penting untuk terlibat di dalamnya; sama seperti di Amerika Serikat dan tempat-tempat lain. (bdk. <https://themaydan.com>)

### Berguru kepada Dag Hammarskjöld

Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld adalah seorang ekonom dan diplomat Swedia kelahiran tahun 1905, yang kemudian menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kedua Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia memangku jabatan itu sejak April 1953 sampai kematiannya akibat kecelakaan pesawat pada September 1961.

Hammarskjöld memiliki keyakinan spiritual yang memengaruhi kebijakan etis dalam kiprah politiknya. Kata kuncinya adalah universalitas dan solidaritas, sebagaimana tertuang dalam piagam PBB. Saat menjabat, Hammarskjöld mampu menyelaraskan pengalaman mistik, kebijakan etis, dan pertimbangan politis. Inilah alasan ia menjadi figur yang dihormati secara luas dalam skala internasional.

Hammarskjöld menyampaikan bagaimana keyakinan pribadinya telah berdampak dalam kiprahnya di dunia internasional. Ia dikenal dengan seruannya untuk mempromosikan etika global atas dasar pengalaman mistik yang ia hidupi. Mistik di sini tak hanya bersifat personal, tetapi juga sosial. Ini tampak nyata dari kutipannya dalam *Markings*:

Selalu di sini dan sekarang – dalam kebebasan yang menyatu dengan jarak, dalam keheningan yang lahir dari kesunyian. (Hammarskjöld, 1964, 133)

Mistik sosial berarti disposisi batin manakala individu mengalami gerak jiwa untuk mengambil jarak dari kepentingan diri guna menghidupi *spiritual freedom* dalam keterlibatan di tengah kehadiran pihak lain dalam ruang dan waktu dunia nyata. Mistik Hammarskjöld sangat dipengaruhi oleh filsuf Yahudi Martin Buber (m. 1965) dan teolog Protestan Albert Schweitzer (m. 1965). Lyon Alynna secara komprehensif merangkum kerangka etis Hammarskjöld ke dalam suatu konstruksi segitiga, yaitu relasi spiritualnya dengan Tuhan,

dalam kehidupan personal, dan di tengah pelayanan publik. Pilar pertama yang melibatkan hubungan spiritualnya dengan Tuhan diistilahkan sebagai *coram Deo*, sedangkan pilar kedua sebagai *coram hominibus*, dan pilar ketiga sebagai *coram mundo*. (Troy, 2010: <https://papers.ssrn.com>)

Kiprah Hammarskjöld selaras dengan praksis yang terarah pada kebaikan bersama. Ia menyatukan etika religius dan penghayatan mistik pribadi yang dianutnya dalam tanggung jawab serta keterlibatan sosial dengan prinsip mau menyikapi masalah-masalah internasional secara netral. Etika dan mistik Hammarskjöld bersumber pada nilai universal yang melampaui perbedaan dan kepentingan pribadi.

Hammarskjöld juga dipengaruhi oleh mistikus Thomas à Kempis (m. 1471), Yohanes dari Salib (m. 1591), dan Meister Eckhart (m. 1328). Ia memegang erat ajaran Yohanes dari Salib tentang aspek rasional dari iman, harapan, dan kasih. Pada dasarnya, ketiga nilai tersebut mengantar orang untuk mengarahkan diri dalam kegembiraan pada gerak vertikal menuju *Thou* (Engkau – Tuhan) dan sekaligus juga pada gerak horizontal menuju *thou* (engkau – sesama). Bagi Hammarskjöld, mistikus tidak boleh terlepas dari dunia nyata atau menjadikan dirinya tujuan *an sich*. Hammarskjöld menghayati hidup mistiknya atas dasar *dictum*, seperti yang ditekankan oleh Thomas à Kempis. “Jika Anda mengandalkan diri sendiri, tidak akan ada yang tercapai, tetapi jika Anda mengandalkan Allah, kasih karunia surgawi akan membebaskan Anda.” *Dictum* itu dimaknainya dengan memaklumkan nilai-nilai universal, seperti kasih, harapan, keadilan, kesetaraan, perdamaian, penghargaan akan keberbedaan, pengorbanan diri, kerja sama, belarasa, dan sikap tidak memihak, ke dalam aktivitas politik yang konkret. Peristiwa kelam yang pernah terjadi dalam sejarah manusia, seperti Perang Dunia I dan II, juga Holocaust, mengantar Hammarskjöld pada sikap peduli akan pelayanan demi kebaikan bersama. Ini terwujud secara konkret dalam pendekatan dan upaya diplomatiknya untuk menyikapi tegangan antara Amerika Serikat dan Cina pada tahun 1952–1954, krisis Terusan Suez pada tahun 1956–1957, dan misi perdamaian di Kongo pada tahun 1960–1965. Dalam *Markings*, ia menegaskan:

Perlakukan orang lain sebagai tujuan, jangan pernah sebagai sarana; dan tentang diri sendiri sebagai tujuan, maknailah dalam kapasitas sebagai sarana,

untuk menggeser garis pemisah dalam keberadaan saya sebagai subjek di hadapan objek, ke posisi di mana subjek, bahkan jika itu terkandung di dalam saya, berada di luar dan di atas saya, sedemikian rupa sehingga seluruh keberadaan saya dapat menjadi sarana bagi apa yang lebih besar dari saya. (Hammarskjöld, 1964, 46)

Maksudnya jelas: Hammarskjöld ingin selalu menempatkan sesama dan kepentingan bersama bukan sebagai objek, melainkan sebagai subjek yang melampaui diri pribadi dan kepentingan personal.

### Tanggapan Reflektif

Pemikiran, kearifan, dan praksis yang dijumpai dari para tokoh dalam lintasan aneka peradaban telah membuka mata akan pentingnya peran pemimpin. Tantangannya terkait dengan tanggung jawab pemimpin untuk melestarikan alam demi kepentingan bersama, melindungi pihak yang lemah dari bayang-bayang dominasi pihak yang lebih kuat, membuat keputusan praktis yang membunmi sesuai dengan konteks yang riil, membangkitkan solidaritas sosial yang positif, memberi keputusan yang adil, menghargai keberbedaan, menyelaraskan antara kebebasan yang bertanggung jawab dan penegakan hukum yang berwibawa, serta memberi perhatian pada pembangunan fisik dan ekonomis yang sesuai dengan harmoni sosial dan kelestarian lingkungan.

Kenyataannya, pada masa kini, tegangan antara etika dan politik hadir semakin kompleks dalam aneka persoalan. Penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi dan tindakan oportunistik untuk memperkaya diri atau kelompok sungguh terjadi: dan itu telah mengakibatkan ketimpangan pada level alokasi atau distribusi sumber daya, layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Proses pengambilan keputusan yang transparan dan informasi yang terbuka juga tidak selalu terwujud, padahal itu akan dapat membantu gerak masyarakat dalam menangani isu-isu seputar lingkungan, hak-hak buruh dan ketidaksetaraan pendapatan, pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, dan lain-lain.

Upaya untuk menyikapi dunia politik tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Permasalahan muncul ketika orang meninjau realitas konkret. Dalam konteks Indonesia, tegangan antara etika dan

politik tampak kentara. Ingar bingar dan hiruk pikuk menyongsong tahun politik 2024 sudah terdengar. Sejumlah pemimpin menanggapi dengan menempatkan diri sebagai seorang politikus murni, sejumlah lainnya juga menampilkan atribut tambahan, misalnya sebagai seorang pemuka agama, atau akademikus, atau yang lain. Sayangnya, pernyataan kritis dan keras yang mereka lontarkan tak selalu bersesuaian dengan realita dan kiprah serta sepak terjang sehari-hari mereka. Ada pula figur yang hanya berhenti pada retorika tanpa aksi nyata, atau figur yang memberi kesan mau begitu saja mengubur memori kelam yang mencederai rasa kemanusiaan pada masa lampau.

Misalnya, ada figur yang mau menagih janji kepada presiden, karena katanya ada 66 janji presiden yang tidak ditepati sejak kampanye pada 2019, padahal janji dia sendiri yang disuarakan dengan gegap gempita beberapa tahun lalu dalam sebuah nazar – bila figur yang ditentangnya menang dalam pemilihan sebagai kepala negara, ia akan menempuh perjalanan jauh, dari satu kota ke kota yang lain dengan berjalan kaki – belum terpenuhi. (<https://www.kompas.tv/> – <https://www.pikiran-rakyat.com/>). Selain itu, ada pula tokoh yang melontarkan kata-kata kasar, padahal dia menganggap diri seorang intelektual, sedemikian rupa sehingga memberi kesan bahwa pihak yang bersangkutan seperti tengah mendelegitimasi dirinya sendiri, sampai-sampai lalu dipandang sebagai figur tak intelek. Salah satu kata-kata bijak dari figur yang terakhir disinggung di sini adalah: “Menghadapi kekerasan, negosiasi adalah kemampuan akal untuk tetap rasional.” Tetapi, rupa-rupanya pihak yang bersangkutan malah terjebak dalam kekerasan verbal dan hilang akal (<https://galamedia.pikiran-rakyat.com>).

Boleh jadi, semua poin di bagian awal tulisan ini memberi kesan serba normatif. Seolah-olah poin-poin etis ada pada satu ranah tertentu, dan realitas politis yang konkret ada pada ranah lain. Tentu, ini tak sepenuhnya benar, karena selalu saja ada tokoh-tokoh yang dapat diangkat sebagai contoh bagaimana mereka berupaya untuk menempatkan diri di tengah-tengah tegangan tersebut. Dag Hammarskjöld adalah salah seorang figur yang dapat disebut di sini. Dia telah memberi pemaknaan segar, bahwa kepemimpinan dalam kelompok sosial yang luas dapat dihidupi secara

positif dengan mendasarkan diri pada cara pandang dan cara bertindak yang dilandasi nilai-nilai universal dan terarah ke kemaslahatan publik (*bonum commune*). ●

**Dr. Heru Prakosa,**

dosen Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

#### RUJUKAN

- Black, Antony, *A World History of Ancient Political Thought*, (Oxford: Oxford University Press, 2016 edisi revisi).
- Black, Antony, *The History of Islamic Political Thought*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011 cet. ke-2).
- Farabi, Al-, *The Political Writings*, (Ithaca: Cornell University Press, 2001).
- Frankfort, Henri, *Kingship and the Gods*, (Chicago: University of Chicago Press, 1978).
- Ghazali, Al-, *Counsel for Kings – Nasihat al-Muluk*, (London: Oxford University Press, 1964).
- Hammarskjöld, Dag, *Markings*, (New York: Ballantine Books, 1964).
- Troy, Jodok, “Dag Hammarskjöld An International Civil Servant uniting Mystics and Realistic Diplomatic Engagement”, dlm. *Diplomacy & Statecraft*, (2010, 21, no. 3 [2010]), 434-450.
- Yana, George, V. *Ancient and Modern Assyrians*, (Bloomington: Xlibris, 2008).
- [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2984377](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2984377)
- <https://www.deccanchronicle.com/opinion/op-ed/190119/mystic-mantra-sufis-on-ethics-and-politics.html>
- <https://themaydan.com/2019/01/theology-obedience-analysis-shaykh-bin-bayyah-shaykh-hamza-yusufs-political-thought/>
- <https://www.kompas.tv/nasional/133321/amien-rais-ditagih-janji-jalan-kaki-dari-yogyakarta-ke-jakarta-oleh-politisi-pdip>
- <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-016892973/amien-rais-sebut-ada-66-janji-jokowi-yang-tidak-ditepati-salah-satunya-soal-utang>
- <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-351421821/kumpulan-kata-kata-bijak-rocky-gerung-bagian-2-rindu-tak-pernah-menetap-tapi-ia-selalu-kembali?page=3>